



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN BPK-RI DI YOGYAKARTA**

**SAMBUTAN KEPALA PERWAKILAN
BPK-RI DI YOGYAKARTA
PADA
PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN ANGGARAN 2010**

*Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.*

Yang terhormat

1. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
2. Bupati Kabupaten Kulon Progo; dhi. Diwakili oleh Wabup
3. Hadirin dan para undangan yang kami hormati.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam kondisi sehat dan selamat.

Hadirin yang kami hormati,

Pada hari ini, Rabu, 18 Mei 2011, telah kita saksikan bersama, penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kulon Progo, dari BPK RI Perwakilan DIY kepada Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kabupaten Kulon Progo. Hal ini dilakukan untuk memenuhi amanat UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat 2 yang menyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 18 Maret 2011. Kami memberikan apresiasi yang cukup baik karena Pemda Kabupaten Kulon Progo telah menyelesaikan draft Laporan Keuangan kurang dari 3 bulan seperti yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang.

Perlu untuk diketahui, pemeriksaan BPK-RI atas LKPD diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara kita dan untuk memenuhi Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan keyakinan apakah Laporan Keuangan Daerah telah disajikan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang ditetapkan di dalam Peraturan Perundangan yang berlaku.

Para Hadirin yang berbahagia,

Laporan yang kami serahkan terdiri dari 3 (tiga) Laporan. Yang pertama adalah adalah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2010, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern.

Dalam Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK-RI memberikan opini mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pertimbangan dalam pemberian opini atas Laporan

Keuangan antara lain adalah kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektifitas sistem pengendalian intern.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, maka atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2010, Opini yang kami berikan masih sama dengan tahun 2009, yaitu ***Wajar Dengan Pengecualian (WDP)***. Hal-hal yang menjadi pengecualian oleh BPK RI adalah atas akun aktiva tetap, investasi non permanen, dan persediaan yang belum dicatat sesuai dengan SAP.

Selain itu diungkapkan pula beberapa catatan pemeriksaan pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap perundang-undangan dan Efektifitas Sistem Pengendalian Intern berikut rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh para pejabat yang berkompeten.

Para Hadirin yang mulia,

Dalam kesempatan ini perlu kami ingatkan bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dan demi efektifnya hasil pemeriksaan BPK RI, maka kami mengharapkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo segera menindaklanjuti rekomendasi BPK RI selambat-lambatnya 60 (Enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Namun apabila ada temuan hasil pemeriksaan yang belum jelas Dewan dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan Perwakilan BPK-RI di Yogyakarta, seperti yang telah diatur dalam MOU.

Hadirin yang kami hormati,

Akhirnya, perkenankan kami atas nama pimpinan dan segenap staf pelaksana BPK-RI menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bupati Kabupaten Kulon Progo dan segenap jajarannya serta Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo yang telah mendukung upaya kami

ikut membangun demokrasi di Negara kita melalui pemeriksaan keuangan daerah yang lebih berhasil guna, sehingga dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan Negara.

Kepada Bupati Kulon Progo dan Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo beserta segenap jajarannya, semoga Hasil Pemeriksaan kami dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Semoga Tuhan YME senantiasa berkenan memberkati, meridhoi, dan melindungi usaha dan karya kita. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di ahti hadirin sekalian.

Bilहितtaufik Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 18 Mei 2011

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN PROPINSI DIY
KEPALA,**

**SUNARTO
NIP. 19590514 198601 1 001**